



Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

Muh. Rizal Khoirudin^{1*}, Muhammad Sandi Arifianto², Shiva Siti Iklimah Ariyanti³,
Revalina Nur Izzah⁴, Juwita Nur Fadila⁵

¹⁻⁵ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email : muhrizal.23081@mhs.unesa.ac.id^{1*}, muhammadsandi.23099@mhs.unesa.ac.id²,
shiva.23068@mhs.unesa.ac.id³, revalina.23052@mhs.unesa.ac.id⁴, juwita.23092@mhs.unesa.ac.id⁵

Korespondensi penulis : muhrizal.23081@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of urban village fund management in efforts to improve facilities and infrastructure as well as community welfare in Dukuh Menanggal Village, Gayungan Subdistrict, Surabaya City. Urban village funds are part of a fiscal decentralization policy that aims to accelerate development and equitable distribution of welfare at the local level. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that the management of urban village funds in Dukuh Menanggal has generally been quite effective, marked by an improvement in the quality of environmental infrastructure such as roads, drains, and other public facilities. In addition, some community empowerment programs also have a positive impact on improving the welfare of residents. However, there are still some obstacles such as limited apparatus capacity, suboptimal community participation, and transparency in reporting that need to be improved. Therefore, it is necessary to strengthen governance, increase the capacity of human resources, and involve the community more actively so that the management of urban village funds can be more optimal and sustainable.*

Keywords: *Village Fund, Management, Infrastructure, Community Welfare, Effectiveness.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana serta kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Dana kelurahan merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan di Dukuh Menanggal secara umum telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, sebagian program pemberdayaan masyarakat juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat yang belum optimal, dan transparansi dalam pelaporan yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif agar pengelolaan dana kelurahan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Kelurahan, Pengelolaan, Sarana Prasarana, Kesejahteraan Masyarakat, Efektivitas.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik di tingkat kelurahan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia sendiri, dana Kelurahan diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP), salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mengamanatkan pengelolaan dana kelurahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan memberikan panduan operasional terkait alokasi dan penggunaan dana kelurahan. Dana kelurahan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kelurahan Dukuh Menanggal, yang terletak di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, menjadi salah satu wilayah yang menerima alokasi dana kelurahan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur jalan, saluran air, serta program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan. Namun, efektivitas penggunaan dana kelurahan di wilayah ini masih menjadi sorotan. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana kelurahan tidak bertahan lama, seperti jalan lingkungan yang cepat rusak atau saluran air yang tidak berfungsi optimal. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana kelurahan masih terbatas, yang berpotensi mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

Permasalahan ini diperparah dengan adanya tantangan dalam hal koordinasi antar stakeholder, seperti antara pemerintah kelurahan, kecamatan, dan masyarakat. Kurangnya kapasitas aparatur kelurahan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar juga menjadi hambatan dalam memastikan dana kelurahan digunakan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana dana kelurahan di Kelurahan Dukuh Menanggal telah digunakan secara efektif, dengan mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan lokal.

Penelitian ini juga didorong oleh pentingnya memahami dampak dana kelurahan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris tentang efektivitas pengelolaan dana kelurahan serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pemerintah kota. Berdasarkan wawasan dari studi literatur dan

pengamatan awal, beberapa rencana pemecahan masalah yang dapat diterapkan pertama, peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dengan pelatihan reguler bagi aparatur kelurahan terkait penyusunan anggaran, pelaksanaan proyek, dan pelaporan keuangan perlu dilakukan. Pelatihan ini dapat bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri atau lembaga terkait lainnya. Kedua, Peningkatan Transparansi yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti website resmi kelurahan atau media sosial, untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana kelurahan secara berkala. Ketiga, Adanya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan yang perlu dioptimalkan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan dana kelurahan. Rencana ini akan diuji melalui penelitian ini dengan mengumpulkan data empiris dari Kelurahan Dukuh Menanggal, termasuk wawancara dengan aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga, serta analisis dokumen seperti laporan keuangan dan RKP Kelurahan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang kontekstual dan aplikatif. Dalam Penelitian ini kami mengaitkan dengan Teori Efektivitas Organisasi menurut Steers (1977), efektivitas organisasi diukur dari kemampuan organisasi mencapai tujuannya dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, pemerintah kelurahan sebagai organisasi publik yang diharapkan dapat menggunakan dana kelurahan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efisien dan efektif. Selain itu dalam penelitian ini juga mengaitkan Teori Good Governance Prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (UNDP, 1997), menjadi landasan untuk menilai pengelolaan dana kelurahan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana. Serta juga Teori Pengelolaan Keuangan Publik Menurut Mardiasmo (2009), pengelolaan keuangan publik yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai regulasi, dan pelaporan yang akuntabel. Teori ini relevan untuk menganalisis proses pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Dukuh Menanggal.

Dalam Penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Amelia (2020) tentang efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Sijungkang, menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama ketidakefektifan penggunaan dana. Penelitian serupa oleh Dana et al. (2019) di Kabupaten Minahasa Utara juga menemukan bahwa efektivitas dana desa bergantung pada kapasitas aparatur dan keselarasan program dengan kebutuhan lokal. Meskipun kajian ini berfokus pada dana desa, prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada dana kelurahan mengingat kesamaan tujuan dan mekanisme pengelolaannya. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Dukuh Menanggal, termasuk identifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Temuan ini akan dirangkum dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup analisis data kualitatif, serta rekomendasi kebijakan yang praktis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas dalam konteks kebijakan publik dipahami sebagai sejauh mana tujuan suatu program dapat tercapai secara optimal. Menurut Steers (1985), efektivitas organisasi merupakan kemampuan untuk meraih hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Gibson et al. (1996) menambahkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan, tetapi juga mempertimbangkan kepuasan pemangku kepentingan dan kualitas pelayanan. Dalam pengelolaan dana kelurahan, efektivitas menjadi parameter utama untuk mengukur apakah alokasi dan penggunaan dana benar-benar memberikan dampak pada pembangunan sarana-prasarana serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Efektivitas tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal dan partisipasi masyarakat yang turut memengaruhi hasil kebijakan publik (Yulita & Apriani, 2023). Maka, pendekatan evaluatif berbasis hasil dan manfaat nyata sangat penting dalam mengkaji pengelolaan dana kelurahan

Good Governance

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi paradigma utama dalam reformasi sektor publik, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Good governance menekankan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan responsivitas sebagai pilar utama dalam pengelolaan sektor publik (UNDP, 1997). Dalam konteks pengelolaan dana kelurahan, keberadaan prinsip-prinsip tersebut menjadi krusial karena menentukan sejauh mana pengambilan keputusan anggaran mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan dijalankan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Frinaldi et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana publik di tingkat kelurahan harus diawali dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Transparansi, seperti penyampaian informasi anggaran dan realisasi kegiatan kepada warga melalui papan pengumuman atau media sosial, berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang penting untuk mencegah penyalahgunaan dana. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan periodik yang dapat diawasi oleh masyarakat, serta audit internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin. Partisipasi warga dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan kelurahan menjadi tolak ukur keberhasilan tata kelola yang baik. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2006),

yang menekankan bahwa good governance hanya dapat berjalan bila birokrasi terbuka terhadap kontrol dan masukan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak tantangan muncul, seperti rendahnya literasi fiskal warga, budaya paternalistik, dan ketimpangan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas (capacity building) baik terhadap aparatur kelurahan maupun masyarakat sipil menjadi prasyarat agar prinsip-prinsip good governance tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap siklus pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, penguatan kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK) dan forum warga juga berperan sebagai instrumen checks and balances yang mendukung prinsip good governance. Frinaldi et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan elemen masyarakat dalam memonitor realisasi pembangunan fisik dan kegiatan sosial dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana kelurahan. Dengan demikian, penerapan good governance menjadi kerangka etik dan prosedural yang menopang efektivitas kebijakan dana kelurahan, sekaligus memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan strategi utama dalam desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan lokal. Dalam kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Oates (1972), desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi sumber daya karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan lokal dibanding pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi fiskal juga memungkinkan alokasi anggaran publik dilakukan lebih responsif dan fleksibel terhadap konteks sosial-ekonomi setempat.

Mardiasmo (2002) menekankan bahwa agar desentralisasi fiskal berjalan efektif, diperlukan mekanisme pengawasan dan perencanaan partisipatif. Pengelolaan dana kelurahan merupakan manifestasi konkret dari kebijakan fiskal yang terdesentralisasi ke level pemerintahan paling bawah. Di sini, kelurahan memiliki otoritas terbatas namun signifikan dalam menentukan penggunaan dana, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan sosial ekonomi. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal dapat berfungsi optimal jika didukung oleh kualitas tata kelola, transparansi anggaran, serta kapasitas manajerial aparatur kelurahan.

Nasir (2022) menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam desentralisasi fiskal bukan hanya soal distribusi dana, melainkan bagaimana dana tersebut dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan. Sering kali terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat

dan prioritas anggaran karena minimnya data yang akurat dan partisipasi yang lemah. Selain itu, minimnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparat kelurahan menyebabkan dana yang sudah dialokasikan tidak termanfaatkan secara optimal.

Namun demikian, dalam konteks Kelurahan Dukuh Menanggal, potensi desentralisasi fiskal dapat direalisasikan melalui sinergi antara kepemimpinan lokal, partisipasi warga, dan dukungan teknokratis dari pemerintah kota. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi, misalnya, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pemanfaatan dana kelurahan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya sekadar kebijakan struktural, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan lokal yang konkrit dan berdampak.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan dan pengelolaan dana publik, termasuk dana kelurahan. Wilensky dan Lebeaux (1965) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisir yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Dalam konteks negara berkembang, akses terhadap sarana dan prasarana dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi menjadi prasyarat agar masyarakat dapat hidup produktif dan bermartabat.

Suharto (2005) menyampaikan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi seperti pendapatan atau konsumsi, tetapi juga mencakup keadilan sosial, rasa aman, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan melalui dana kelurahan harus dipahami secara multidimensional. Artinya, program yang dijalankan tidak boleh sekadar fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyasar dimensi sosial dan kultural masyarakat.

Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Misalnya, perbaikan saluran air dan jalan lingkungan tidak hanya meningkatkan mobilitas warga tetapi juga mengurangi risiko penyakit dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan perempuan yang didanai dari dana kelurahan telah terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat jejaring sosial warga. Hal ini membuktikan bahwa aspek kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari dimensi pembangunan partisipatif dan inklusif.

Kesejahteraan sosial juga erat kaitannya dengan kepercayaan sosial (social trust) dan kohesi sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang merasa didengar dan dilibatkan, program-program pembangunan cenderung diterima dan dirawat dengan baik. Oleh karena itu,

penguatan dimensi kesejahteraan sosial dalam kebijakan dana kelurahan juga memerlukan pendekatan sosiologis yang mampu memahami nilai-nilai lokal, struktur sosial, dan praktik kultural yang ada di masyarakat.

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pengelolaan dana kelurahan, hambatan yang dihadapi, serta tingkat efektivitasnya berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan lokal. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas pengelolaan dana kelurahan secara empiris dan kontekstual.

Metode kualitatif memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk memahami makna dari pengalaman para pelaku yang terlibat dalam proses kebijakan dan pelaksanaan dana kelurahan, termasuk perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2006), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti, dengan penggambaran secara menyeluruh dan kontekstual dalam bentuk kata-kata, bukan angka statistik.

Lebih jauh lagi, jenis penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan studi kebijakan pembangunan lokal, karena mampu mengeksplorasi realitas kebijakan dari bawah (bottom-up). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan situasi yang terjadi, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui proses wawancara mendalam dan observasi lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Asisten Bendahara), ketua RT, dan tokoh masyarakat yang memiliki peran langsung atau pemahaman mendalam terkait proses pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Dukuh Menanggal.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan sumber tertulis lainnya, seperti laporan realisasi anggaran kelurahan, hasil musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang), rencana kerja pemerintah kelurahan (RKP-Kel), serta regulasi yang mengatur penggunaan dana kelurahan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap informasi yang diperoleh dari sumber primer dan untuk memahami konteks administratif dan kebijakan secara menyeluruh. Sumber data (informan) dalam penelitian ini meliputi:

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Asisten Bendahara Kelurahan) – 1 orang (Sebagai pihak yang mengetahui alur penggunaan dana dan sistem administrasi keuangan kelurahan)
2. Ketua RT – 1 orang (Sebagai representasi masyarakat yang memantau dan menyampaikan aspirasi warga)
3. Tokoh masyarakat lokal – 1 orang (Sebagai pihak yang memahami kondisi sosial dan dampak nyata dari program pembangunan)

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, proses, dan interaksi sosial. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan partisipan dan lingkungan penelitian (Miles & Huberman, 1994). Data utama yang dikumpulkan berupa narasi, pendapat, dan tindakan dari informan, sementara dokumen, arsip, dan catatan lapangan digunakan sebagai pelengkap. Berdasarkan pendekatan tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan kunci seperti perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat program. Tujuannya adalah untuk memperoleh penjelasan rinci mengenai pengelolaan dana kelurahan, dampak program pembangunan, serta persepsi masyarakat terhadap kesejahteraan sosial. Peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar proses dialog tetap fleksibel namun tetap fokus pada isu utama (Creswell, 2016).

2. Kajian Dokumen

Selain data primer, peneliti juga mengakses data sekunder dari dokumen resmi seperti laporan pelaksanaan program kelurahan, hasil Musrenbang, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Dokumen ini memberikan konteks administratif yang berguna untuk mengonfirmasi dan membandingkan dengan hasil wawancara. Kajian dokumen juga membantu dalam memahami dinamika pengambilan kebijakan dan realisasi anggaran (Bowen, 2009).

3. Observasi Lapangan

Pengamatan langsung dilakukan di lokasi kegiatan fisik seperti pembangunan jalan lingkungan, fasilitas umum, dan kegiatan sosial ekonomi. Observasi ini memungkinkan peneliti mencatat aktivitas aktual dan kondisi infrastruktur, serta memperkuat validitas data melalui pencatatan sistematis terhadap perilaku dan situasi nyata. Teknik ini penting untuk memahami hubungan antara program dan konteks sosialnya (Spradley, 1980).

Mode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis untuk mengungkap pola, makna, dan hubungan sosial dalam konteks pengelolaan dana kelurahan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dianalisis secara interaktif dengan mengikuti tiga tahapan utama menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014), yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengkodean tema, pemotongan informasi yang tidak relevan, serta merangkum narasi sesuai fokus penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, informasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau kutipan langsung dari informan. Penyajian ini memungkinkan peneliti mengorganisasikan data sehingga mudah dianalisis dan diinterpretasi, serta mendukung pembentukan hubungan antarvariabel dalam konteks sosial.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing & Verification)

Tahap akhir adalah menarik makna dari pola-pola yang muncul dan membandingkan temuan dengan teori atau konteks empiris. Verifikasi dilakukan dengan melakukan triangulasi data dari berbagai sumber (informan, dokumen, dan observasi), serta melalui diskusi hasil sementara kepada informan (member checking) untuk menjamin validitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Dukuh Menanggal terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu pembangunan sarana dan prasarana serta program pemberdayaan masyarakat. Dana yang dialokasikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dengan total nilai mencapai Rp3

miliar, yang kemudian didistribusikan untuk kegiatan fisik maupun non-fisik di tingkat kelurahan.

Pada aspek pembangunan fisik, penggunaan dana mencakup kegiatan pavingisasi jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase, serta pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang melibatkan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar sebagai penunjang aktivitas masyarakat dan bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan publik.

Sementara itu, dalam aspek non-fisik, dana digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti dukungan operasional RT/RW, pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK), serta pembiayaan utilitas seperti listrik, token listrik, dan tagihan PDAM. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kelangsungan layanan publik, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat kapasitas sosial-ekonomi warga secara langsung.

Perencanaan anggaran dilakukan melalui partisipasi warga mulai dari tingkat RT ke RW. Masing-masing RT diberikan keleluasaan dalam menyusun usulan kebutuhan dan prioritas wilayah, yang kemudian didiskusikan dalam forum RW. Sebagai contoh, dalam pengalokasian dana pajak sebesar Rp1 juta, masyarakat dan pengurus RT dapat menyepakati penggunaan untuk program seperti "Paten" atau kebutuhan administratif lainnya. Proses ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan anggaran sebagai wujud dari praktik pemerintahan yang partisipatif.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun proses perencanaan berjalan partisipatif, keputusan akhir mengenai pengesahan anggaran tetap berada di tingkat kecamatan atau kota. Kelurahan memiliki peran terbatas sebagai pelaksana teknis. Misalnya, untuk pengajuan perbaikan paving jalan dengan dana yang tersedia Rp700 ribu, diperlukan musyawarah lanjutan antara RT dan kelurahan guna menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat urgensi. Hal ini mencerminkan adanya kompromi antara kebutuhan warga dan keterbatasan fiskal, sekaligus menunjukkan pentingnya efisiensi dalam alokasi dana publik.

Sistem pengawasan dalam pelaksanaan program dilakukan secara berlapis. Pemerintah Kota Surabaya menunjuk konsultan teknis dan dinas terkait untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program, termasuk melalui kegiatan lokakarya teknis. Di tingkat lokal, pengawasan dilaksanakan oleh aparat kelurahan, unsur masyarakat, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk di tingkat RT/RW. Pokmas terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kelurahan dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan peraturan.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Dari perspektif teori efektivitas organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Steers (1985), pengelolaan dana kelurahan di Dukuh Menanggal mencerminkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial. Efektivitas ini tidak hanya terlihat dari keberhasilan realisasi fisik, seperti peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat yang dirasakan dalam pelayanan dan hasil pembangunan. Hal ini selaras dengan pemikiran Gibson et al. (1996) yang menekankan bahwa efektivitas organisasi harus diukur dari pencapaian tujuan strategis dan persepsi pengguna layanan.

Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan dana kelurahan menjadi faktor penentu utama keberhasilan. Studi Yulita & Apriani (2023) menegaskan bahwa partisipasi warga meningkatkan legitimasi kebijakan publik dan hasil pembangunan yang lebih optimal. Dalam konteks Dukuh Menanggal, musyawarah pengajuan anggaran oleh RT dan RW menjadi forum demokratis yang memperkuat akuntabilitas sosial. Namun, partisipasi ini belum sepenuhnya merata. Tantangan seperti rendahnya literasi fiskal masyarakat dan budaya paternalistik masih membatasi kapasitas warga untuk berperan maksimal dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan (Frinaldi et al., 2024; Dwiyanto, 2006). Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi pelatihan dan edukasi guna meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berkontribusi secara lebih efektif.

Prinsip-prinsip good governance yang diusung oleh UNDP (1997) yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas menjadi pondasi penting dalam pengelolaan dana kelurahan ini. Transparansi diwujudkan melalui publikasi informasi anggaran yang terbuka dan mudah diakses masyarakat, sementara akuntabilitas ditegakkan melalui pelaporan berkala dan mekanisme pengawasan oleh Pokmas serta instansi teknis. Meski demikian, budaya birokrasi dan pola paternalistik dalam pemerintahan lokal masih menjadi penghambat bagi terciptanya partisipasi warga yang penuh dan otonom. Hal ini mencerminkan perlunya reformasi budaya organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Selain itu, desentralisasi fiskal yang menempatkan otoritas pengelolaan dana di tingkat kelurahan memberi peluang besar untuk alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Oates (1972) dan Mardiasmo (2002). Akan tetapi, keberhasilan desentralisasi ini sangat bergantung pada kualitas perencanaan partisipatif dan pengawasan yang ketat agar dana tidak disalahgunakan dan pemerataan manfaat dapat terjamin (Nasir, 2022). Dukuh Menanggal menerima alokasi dana

hingga Rp3 miliar yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan sosial. Kelurahan memiliki otoritas terbatas namun strategis dalam merancang dan mengusulkan kegiatan. Sayangnya, mekanisme ini belum sepenuhnya mencerminkan semangat desentralisasi substantif. Otoritas kelurahan kerap tersubordinasi oleh keputusan teknokratis di tingkat kota, sehingga kelurahan hanya bertindak sebagai pelaksana, bukan perencana otonom. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola kelurahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan fungsi desentralisasi fiskal.

Dari sisi kesejahteraan sosial, pengelolaan dana kelurahan di Dukuh Menanggal telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perbaikan sarana dan prasarana publik seperti jalan dan saluran air lingkungan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, tetapi juga berdampak positif terhadap penurunan risiko kesehatan dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi bagi perempuan, memperkuat kapasitas ekonomi rumah tangga sekaligus memperkuat jejaring sosial di tingkat komunitas. Hal ini mendukung pandangan Suharto (2005) yang menekankan kesejahteraan sebagai konsep multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Penguatan modal sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat juga terbukti meningkatkan kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah kelurahan, yang merupakan prasyarat utama keberlanjutan program pembangunan (Sari et al., 2024). Dalam masyarakat yang merasa didengar dan diberdayakan, pengelolaan dana kelurahan tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga meningkatkan kohesi sosial dan kapasitas kolektif untuk menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan.

5. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari efektivitas pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana kelurahan telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dana kelurahan, yang bersumber dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp 3 Miliar, dimanfaatkan untuk kegiatan fisik seperti pavingisasi jalan, perbaikan drainase, dan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta kegiatan non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan operasional RT/RW. Proses perencanaan anggaran yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah RT/RW mencerminkan praktik

pemerintahan yang partisipatif, meskipun keputusan akhir tetap berada di tingkat kecamatan atau kota, sehingga peran kelurahan lebih sebagai pelaksana teknis.

Efektivitas pengelolaan dana kelurahan yang diukur berdasarkan teori efektivitas organisasi (Steers, 1985), yang menunjukkan bahwa kelurahan dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi landasan penting dalam melaksanakan program, meskipun tantangan seperti rendahnya literasi fiskal masyarakat dan budaya paternalistik masih membatasi partisipasi warga secara penuh. Desentralisasi fiskal memberikan peluang untuk alokasi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi keterbatasan otoritas kelurahan dan kurangnya kapasitas aparatur menjadi hambatan dalam mewujudkan desentralisasi substantif. Secara keseluruhan, pengelolaan dana kelurahan telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan sosial-ekonomi, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah kelurahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana Kelurahan di Dukuh Menanggal. Agar pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Dukuh Menanggal lebih efektif, perlu dilakukannya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis yang rutin, khususnya dalam perencanaan serta pelaporan keuangan. Partisipasi masyarakat juga perlu diperluas, agar proses musyawarah benar-benar mencerminkan kebutuhan warga secara menyeluruh. Selain itu, transparansi penggunaan dana harus ditingkatkan misalnya dengan memanfaatkan media informasi publik. Pemerintah Kota juga disarankan memberi kewenangan lebih besar kepada kelurahan dalam menentukan program prioritas, agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Evaluasi berkala yang melibatkan masyarakat perlu dilakukan untuk menilai dampak program, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frinaldi, A., Yulanda, A., & Putri, N. E. (2024). Optimalisasi Budgeting Policy dalam Mewujudkan Good Local Governance Pasca Desentralisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1).
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, A. (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah*. OSF Preprints.
- Putri, D. (2018). Program PLPBK dalam Mewujudkan Community Governance di Kelurahan Kedung Cowek. Universitas Airlangga.
- Rizkwanti, R. A. K. D. (2017). *Kapasitas Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Endogen*. Universitas Airlangga.
- Sari, P. Z., Sari, N., & Prastoeti, R. R. (2024). Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 2(1).
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Suharto, E. (2005). *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta
- Susanti, N. (2018). *Pengembangan Community Based Economic Development sebagai Upaya Pencapaian SDGs 2030*. Universitas Airlangga.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.
- Wilensky, H. L., & Lebeaux, C. N. (1965). *Industrial Society and Social Welfare*. New York: Free Press.
- Yulita, R., & Apriani, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*